

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2

Dewan Desak Pemprov Minimalkan Silpa

SEMARANG - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng Tahun Anggaran 2016 disetujui DPRD. Meski begitu, Pemprov Jateng diminta lebih meningkatkan perencanaan anggaran agar program pembangunan dapat terealisasi dengan baik dan meminimalkan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, Abdul Hamid menjelaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu merancang program yang berorientasi pada percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan berbasis data. Selain itu, pemprov juga diminta memperhatikan perencanaan dan sasaran dalam penganggaran belanja tidak langsung pos belanja pegawai. Sebab pada 2016 lalu terdapat sisa 1,1-2,5 persen dari pagu anggaran. Apalagi sejak tahun ini pemprov juga mendapat pelimpahan sekitar 28 ribu pegawai dari kabupaten/ kota.

"SKPD diharapkan lebih memperhatikan perencanaan anggaran agar program pembangunan dapat terealisasi dan dapat meminimalkan silpa," katanya saat Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jateng 2016, di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jateng, Kamis (6/7).

Dalam penyusunan laporan anggaran, Hamid mengusulkan adanya format laporan yang sama agar mudah dipahami dan memuat realisasi anggaran dan fisik. Tidak hanya itu, pengelolaan aset mesti terus dibenahi dengan lebih inovatif. "Pelaksanaan APBD ke depan dalam melaporkan program dan kegiatan agar ditambah dengan dampak atau *outcome* sehingga dapat diketahui pengaruhnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Heru Sudjatmoko menuturkan, dengan disetujuinya Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 pihaknya akan segera menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

agar segera mendapatkan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan untuk menyempurnakan Raperda agar bisa segera ditetapkan sebagai Perda.

Dia juga menyampaikan terima kasih atas usulan-usulan yang diberikan kepada pemprov, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun yang akan datang. "Semoga suasana harmonis antara eksekutif dan legislatif serta *stakeholder* dapat terus seiring, seirama dan sinergi agar menghasilkan kinerja yang optimal dalam mewujudkan masyarakat Jateng yang semakin maju," harapnya.

Dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jateng 2016 secara garis besar realisasinya sebagai berikut, pendapatan Rp 19,632 triliun, belanja Rp 19,354 triliun, dan surplus Rp 278,20 miliar. Sedangkan pembiayaan mencakup penerimaan Rp 417,92 miliar, pembiayaan Rp 50 miliar, pembiayaan netto Rp 367,92 miliar dan silpa Rp 646,12 miliar. (**amh/ric/ce1**)